

# PROGRAM PRIORITAS

## DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



# KETERKAITAN VISI DAN MISI RANCANGAN RPJMN, KEMENTERIAN PERTANIAN, DAN DITJEN PKH 2025-2029

## VISI

RANCANGAN RPJMN	KEMENTERIAN PERTANIAN	DITJEN PKH
Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045	Pertanian maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045	<b>"Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"</b>

## MISI

RANCANGAN RPJMN	KEMENTERIAN PERTANIAN	DITJEN PKH
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesejahteraan petani</li> <li>2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian</li> <li>3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia</li> <li>4. Mencegah dan menangani penyakit hewan kepada manusia</li> <li>5. Meningkatkan penajaman Reformasi birokrasi Kementan yang berdampak langsung kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat</li> <li>3. Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.</li> </ol>

## TUJUAN



Meningkatnya volume usaha peternakan



Terwujudnya swasembada pangan asal peternakan



Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan



Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia





# **PROGRAM PRIORITAS DITJEN PKH: PENINGKATAN PRODUKSI SUSU DAN DAGING NASIONAL (P2SDN)**

# ISU STRATEGIS: PROGRAM MAKAN BERGIZI

UNTUK 82,9 JUTA ORANG PENERIMA

## Neraca Tahun 2024

### a. Daging Ayam Ras



Kebutuhan Nasional	: 3,72 juta ton
Produksi Nasional	: 3,84 juta ton
<b>Surplus</b>	<b>: 0,12 juta ton</b>

### b. Telur Ayam Ras



Kebutuhan Nasional	: 6,2 juta ton
Produksi Nasional	: 6,3 juta ton
<b>Surplus</b>	<b>: 0,17 juta ton</b>

### c. Daging Sapi



Kebutuhan Nasional	: 0,77 juta ton
Produksi Nasional	: 0,37 juta ton (48%)
<b>Defisit</b>	<b>: 0,4 juta ton (52%)</b>

### d. Susu



Kebutuhan Nasional	: 4,7 juta ton
Produksi Nasional	: 1 juta ton (21%)
<b>Defisit</b>	<b>: 3,7 juta ton (79%)</b>

## Tantangan & Peluang

1. Peningkatan kebutuhan
2. Distribusi dan disparitas harga
3. Isu keamanan pangan
4. Ketergantungan impor
5. Regenerasi dan kesejahteraan peternak
6. Potensi investasi
7. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja



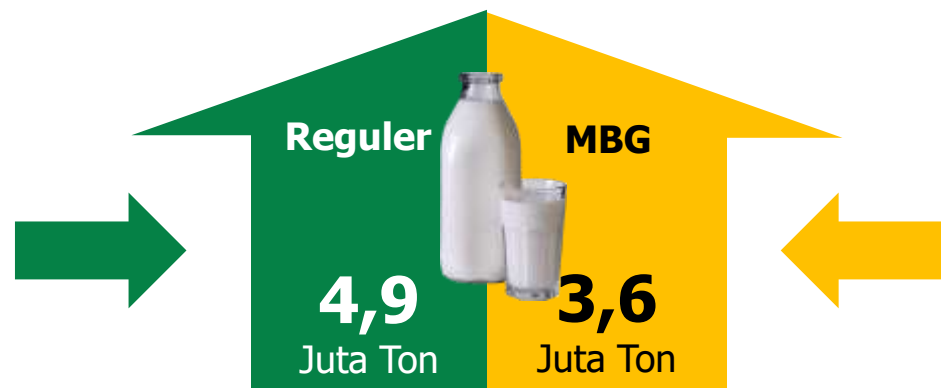
# PETA JALAN PEMENUHAN SUSU SEGAR 2025 - 2029

Kebutuhan 2029  
8,5 Juta Ton

Kebutuhan 2024  
4,7 Juta Ton

Produksi: 1 Juta Ton (21%)  
Impor: 3,7 Juta Ton (79%)

Konsumsi: 16,43 kg/kapita/tahun



**Susu Segar**

Produksi: 8,17 Juta Ton (96%)  
Impor: 0,33 Juta Ton (4%)

Impor 1 Juta Ekor  
(2025-2029)

Pelaksana: Perusahaan Swasta  
Kebutuhan Lahan: 0,5 Juta Ha

**Sumber:** Australia, Brazil,  
New Zealand, USA, Mexico

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Impor Indukan (ekor)</b>	200.000	300.000	400.000	100.000	-
<b>Kebutuhan (Juta Ton)</b>	8,26	8,32	8,37	8,43	8,48
<b>Produksi (Juta Ton)</b>	1,55 (18,72%)	2,90 (34,89%)	5,07 (60,48%)	6,53 (77,51%)	8,17 (96,28%)
<b>Defisit (Juta Ton)</b>	6,72 (81,28%)	5,42 (65,11%)	3,31 (39,52%)	1,89 (22,49%)	0,32 (3,72%)







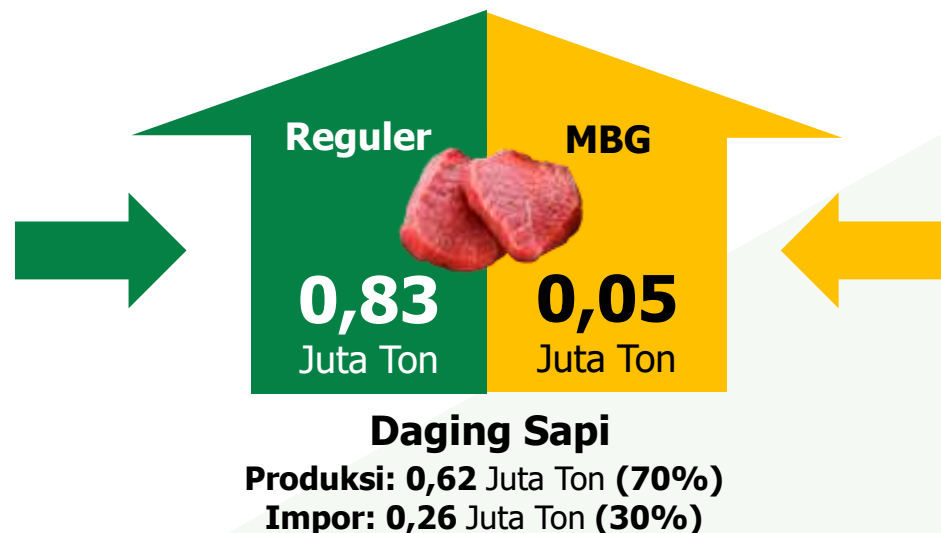
# PETA JALAN PEMENUHAN DAGING SAPI 2025 - 2029

Kebutuhan 2029  
0,88 Juta Ton

Kebutuhan 2024  
0,77 Juta Ton

Produksi: 0,37 Juta Ton (48%)  
Impor: 0,4 Juta Ton (52%)

Konsumsi: 2,91 kg/kapita/tahun



	2025	2026	2027	2028	2029
Impor Indukan (ekor)	200.000	400.000	400.000	-	-
Kebutuhan (Juta Ton)	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88
Produksi (Juta Ton)	0,38 (45,50%)	0,39 (46,21%)	0,47 (53,71%)	0,42 (55,17%)	0,62 (70,45%)
Defisit (Juta Ton)	0,46 (54,50%)	0,46 (53,79%)	0,40 (46,29%)	0,37 (42,68%)	0,27 (29,54%)



# STRATEGI JANGKA MENENGAH-PANJANG PENINGKATAN PRODUKSI SUSU DAN DAGING NASIONAL

## Mendorong Investasi (Link & Match)

### IDENTIFIKASI LAHAN



#### DARATAN

Jumlah Lahan : 3.307

Luas Lahan:  
1.256.178 Ha



#### PULAU

Jumlah Pulau: 39

Luas Pulau:  
497.644 Ha

Total Lahan:  
3.346

Total Luas Lahan:  
1.755.363 Ha

Komitmen  
Investor

Integrasi  
Pemanfaa  
tan Lahan

Update 29 Desember 2024



Sapi Perah  
1.325.704 ekor  
144 pelaku usaha



Sapi Pedaging  
805.167 ekor  
70 pelaku usaha

Dukungan  
Regulasi &  
Kebijakan

Penguatan  
Kerja  
Sama  
B to B

32  
pelaku  
usaha



49  
pelaku  
usaha

102  
pelaku  
usaha



21  
pelaku  
usaha

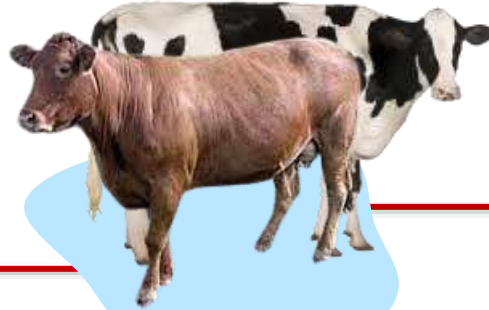
KOLABORASI, SINERGI DAN DUKUNGAN LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

## KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG DIBUTUHKAN

### UNTUK MENDUKUNG INVESTASI PETERNAKAN SAPI PERAH & SAPI PEDAGING

#### KEBIJAKAN UMUM

1. **Regulasi** pemasukan sapi perah dan sapi bakalan betina produktif dari negara baru.
2. Regulasi penyerapan **susu** oleh IPS dan **daging sapi** oleh HOREKA
3. Regulasi **pelabelan susu** (persentase kandungan susu segar dalam kemasan)
4. **Jaminan pasar susu dan daging** untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).



#### KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. **Insentif sewa lahan** agar *feasible*.
2. Penyediaan **infrastruktur** dan **logistik** kawasan investasi peternakan.
3. Percepatan penyediaan hijauan pakan ternak.
4. Pengembangan **mekanisasi, sistem informasi dan teknologi digital**.
5. Pengembangan **ekosistem investasi**.

#### KEBIJAKAN FISKAL DAN FASILITASI PEMBIAYAAN KOMERSIL

1. Fasilitasi **Tax Holiday**.
2. Penyediaan Kredit Usaha Sapi (KUS) bunga 3% dan *grace period* 3 tahun.
3. Bea Masuk dan PPN pemasukan Sapi Perah dan Bakalan Betina Produktif 0%.
4. Asuransi Usaha Ternak Sapi (**AUTS**).





## DUKUNGAN KEMENTERIAN & LEMBAGA

### DALAM PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI SUSU DAN DAGING NASIONAL

No	Kementerian/Lembaga	Dukungan
1	Kementerian Sekretariat Negara	Rancangan PerPres, Penetapan PSN
2	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Koordinasi antar K/L
3	Kementerian PPN/Bappenas	Penetapan PSN
4	Kementerian Hukum	Penyelesaian regulasi terkait peternakan
5	Kementerian Keuangan	Dukungan anggaran dan skema Kredit Usaha Sapi (KUS)
6	Kementerian ATR/BPN	Legalitas lahan dan penetapan tata ruang
7	Kementerian Kehutanan	Penyediaan lahan investasi peternakan
8	Kementerian Perdagangan	Perdagangan dan akses pasar produk susu dan daging sapi
9	Kementerian Perindustrian	Regulasi penyerapan susu dan daging sapi dalam negeri
10	Kementerian BUMN	Penyediaan lahan dan infastruktur investasi peternakan
11	Kementerian Perhubungan	Akses transportasi dan logistik (Pelabuhan, Bandara)
12	Kementerian PU	Fasilitasi infrastruktur pendukung
13	Kementerian Desa PDT	Penyerapan susu dan daging sapi
14	Badan Gizi Nasional	Penyerapan produk susu dan daging sapi pada Program Makan Bergizi Gratis
15	Badan Karantina Indonesia	Percepatan karantina pemasukan ternak
16	Badan Bank Tanah	Penyediaan lahan investasi peternakan
17	PT Perkebunan Nusantara II	Penyediaan lahan investasi peternakan
18	Perhutani	Penyediaan lahan investasi peternakan
19	BMKG	Penyediaan informasi klimatologi pada lokasi lahan investasi peternakan

# RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN RI TENTANG PERCEPATAN PRODUKSI SUSU DAN DAGING NASIONAL (P2SDN)

P2SDN: Upaya percepatan peningkatan produksi susu dan daging untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

## Ruang Lingkup

RANCANGAN  
PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

RENCANA AKSI  
P2SDN

### 1. Strategi

- Peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah dan pedaging;
- Penyediaan lahan untuk investasi peternakan;
- Dukungan pembiayaan;
- Penyediaan infrastruktur, mekanisasi, digitalisasi, dan hilirisasi peternakan;
- Penguatan kelembagaan dan sinergitas usaha peternakan;
- Penumbuhan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas usaha peternakan.
- Peningkatan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

### 2. Penyelenggaran P2SDN

### 3. Penyerapan susu dan daging nasional

### 4. Pemantauan dan evaluasi

### Waktu Pelaksanaan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I Tahun 2025-2029
- Dapat dilanjutkan pada RPJMN berikutnya (menjamin keberlanjutan peningkatan produksi susu dan daging)



## ASTA CITA

2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Percepatan Produksi  
**SUSU & DAGING**  
**NASIONAL** (P2SDN)





# **PROGRAM PRIORITAS DITJEN PKH: PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PMK**



# PENGENDALIAN & PENANGGULANGAN PMK TERTARGET BERDASARKAN ZONA

## TUJUAN

1. Mengurangi kejadian dan risiko PMK secara progresif pada wilayah tertular
2. Mencapai pengakuan Official Control Programme PMK oleh WOA
3. Mempertahankan wilayah Bebas PMK → penetapan zona bebas oleh WOA

## INDIKATOR KINERJA

- Nol kasus pada usaha peternakan skala besar/komersil dan UPTP/D Perbibitan
- Kasus pada peternakan rakyat menurun menjadi nol kasus pada tahun 2029 di zona merah dan kuning
- Mempertahankan wilayah tetap bebas

## TARGET PENGENDALIAN & PENANGGULANGAN PMK PER ZONA 2025-2029

### Zona Pengendalian (minimum intervensi)

P. Sumatera\*, P. Kalimantan. P. Sulawesi

Populasi 30%, menerima dari zona merah, lalu lintas ternak terbatas di wilayah, ekstensif, penyakit sporadis

Rencana Aksi:

Surveilans, respon kasus, Pengobatan, Kontrol Lalu Lintas,



Populasi 3.683.422 ekor

#### target Vaksinasi di Zona Kuning:

2025 : 6.739.560 dosis, 2026 : 7.030.035 dosis,  
2027 : 7.333.030 dosis, 2028 : 7.649.083 dosis,  
2029 : 7.978.759 dosis

SDM 773 Puskesmas, 629 Medik, 2063 Paramedik,  
985.576 RTUP

#### Bulan vaksinasi:

Prioritas I : Setiap Jan-Feb & Juli-Agus (pelaksanaan serentak)

### Zona Pemberantasan (maksimum intervensi)

Prov. Lampung, P. Jawa, Bali, NTB

Populasi 60%, sentra ternak, produsen ternak, lalu lintas ternak antar pulau densitas tinggi, insidensi kasus tinggi, intensif

Rencana Aksi:

Vaksinasi Kontinu 5 tahun (serentak Bulan Vaksinasi),  
Pengobatan, Surveilans, Kontrol Lalu Lintas,



#### PRIORITAS INTERVENSI

Populasi 7.237.396 ekor

#### Target Vaksinasi di Zona Merah:

2025 : 13.027.312 dosis, 2026 : 13.588.789 dosis,  
2027 : 14.174.466 dosis, 2028 : 14.785.385 dosis,  
2029 : 15.422.636 dosis

SDM: 625 Puskesmas, 1026 Medik, 1554 Paramedik  
3.102.809 RTUP

#### \*Perhitungan target vaksin / tahun :

90% populasi; estimasi pertumbuhan 4,31%, sumber data Sensus Pertanian 2023

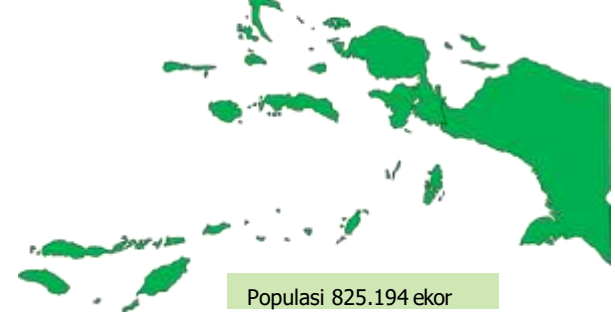
### Zona Pencegahan (minimum intervensi)

NTT, P. Maluku, P. Papua

Populasi 10%, lalu lintas ternak terbatas, ekstensif, bebas PMK

Rencana Aksi:

Surveilans, deteksi dini, kesiapsiagaan darurat, biosekuriti



Populasi 825.194 ekor

#### Target Vaksinasi di Zona Hijau:

2025 : 0 dosis, 2026 : 0 dosis,  
2027 : 0 dosis, 2028 : 0 dosis,  
2029 : 0 dosis

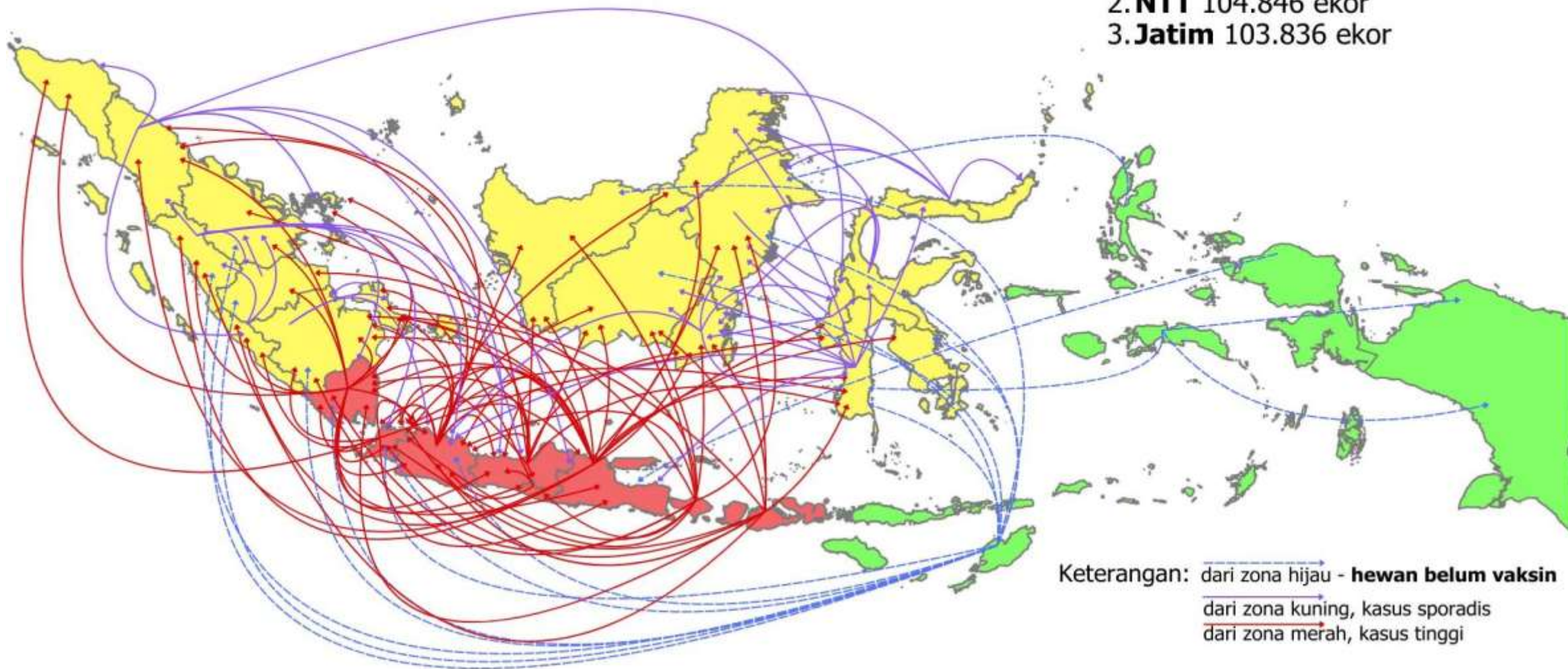
SDM 313 Puskesmas, 223 Medik, 736 Paramedik  
213.670 RTUP



## Sebaran Lalu Lintas Hewan Rentan PMK (HRP) Antar Provinsi 1 Feb - 6 Des 2024

3 Provinsi dengan volume tertinggi:

1. **Lampung** 316.018 ekor
2. **NTT** 104.846 ekor
3. **Jatim** 103.836 ekor



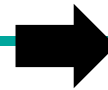


# RENCANA DUKUNGAN APBN & STRATEGI PELAKSANAAN TA. 2025

## Anggaran

APBN, APBD, Sumber lainnya

Mendukung pelaksanaan Vaksinasi 4.000.000 dosis

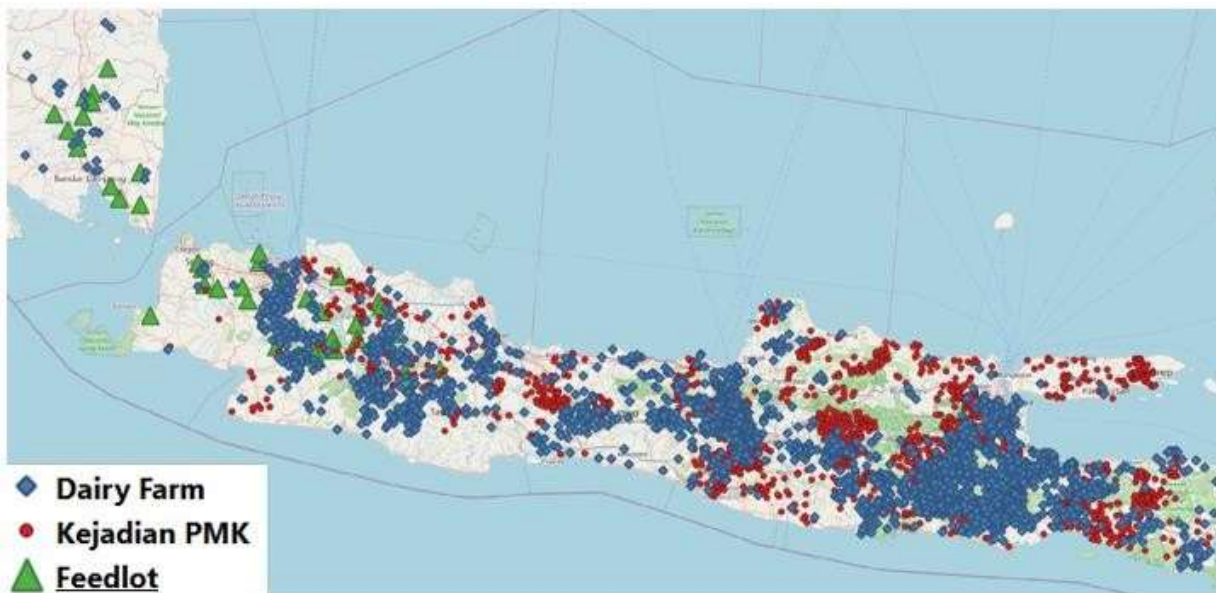


Pengadaan **Vaksin** (BBVF Pusvetma), **Logistik**, dan **Obat** di Pusat Swakelola oleh BBVF PUSAVETMA

## Pengelola Operasional Pelaporan Vaksinasi

- Pelaporan pelaksanaan vaksinasi **melalui iSIKHNAS** oleh PJ iSIKHNAS di OPD Prov dan Kab/Kota.
- Vaksinasi dilaksanakan oleh Tenaga Keswan Pemerintah & bisa dibantu oleh tenaga keswan mandiri, Asosiasi (PDHI, IDHSI, AFKHI, ISPI, Paravetindo & PAVETI) dan/atau mahasiswa → **sepanjang ditetapkan oleh kepala dinas.**

## Peta Target Vaksinasi di Zona Pemberantasan



## Strategi Vaksinasi

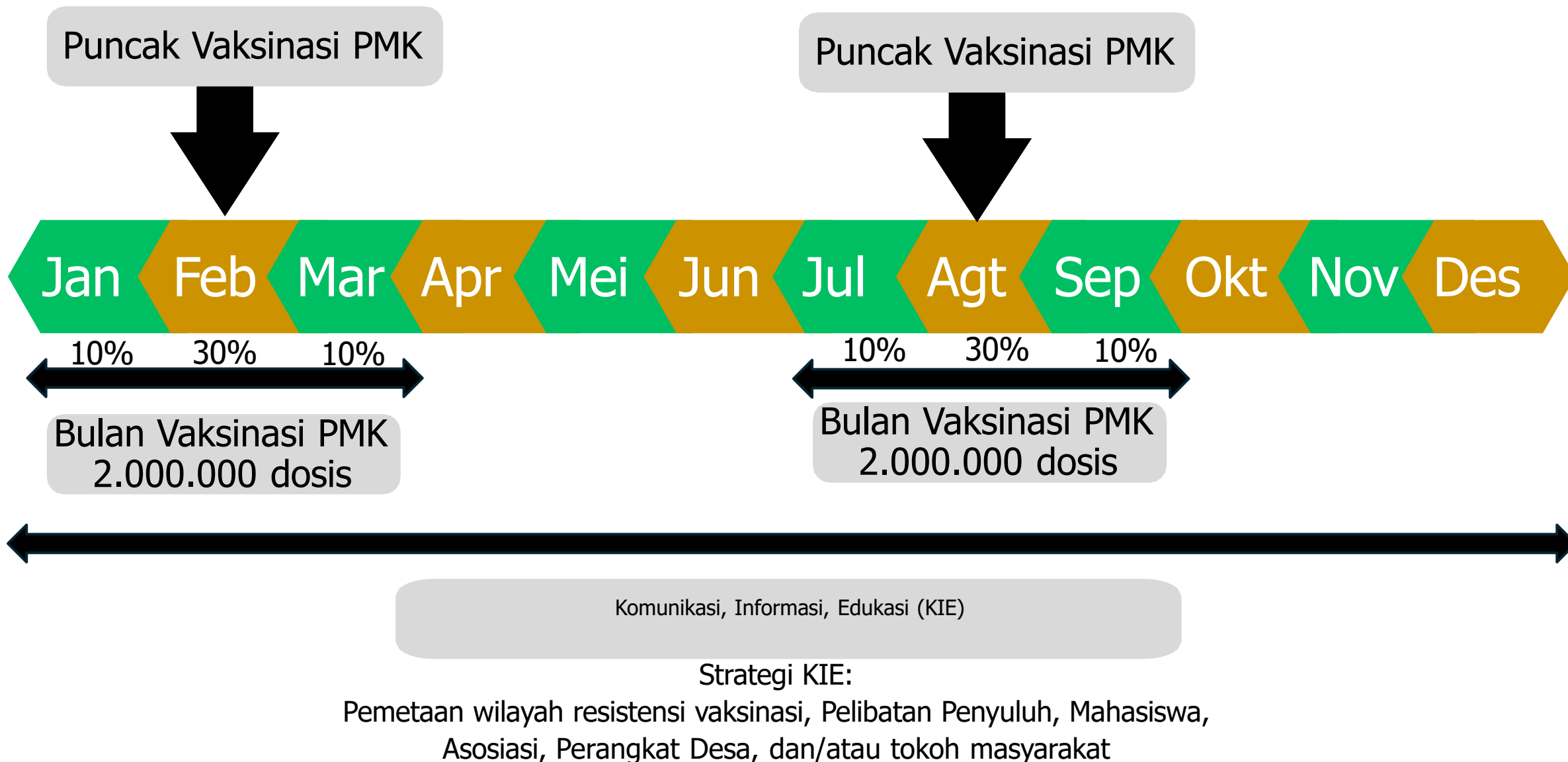
- Vaksinasi dimulai dari desa yang **tidak dilaporkan kasus** dalam kurun waktu **14 hari terakhir** berdasarkan data iSIKHNAS.
- Vaksinasi hanya dilakukan pada **sapi** atau **kerbau sehat, minimal umur 3 bulan, dan tidak bunting** (atau ikuti petunjuk penyedia).
- Target vaksinasi berdasarkan prioritas hasil pemetaan risiko, meliputi:
  - a. **Prioritas 1: Sapi perah** dan **radius 3 km**
  - b. **Prioritas 2: UPTP/D Perbibitan** dan **Radius 3 km**
  - c. **Prioritas 3: Peternak Rakyat** (sapi pedaging)
  - d. Kambing, domba, dan babi (terutama dalam unit peternakan sapi/kerbau)
- Ternak pada radius 3 km dari Perusahaan swasta/mitra diutamakan menggunakan CSR
- Vaksinasi dilaksanakan pada Bulan **Januari s.d. Maret 2025** dan **Juli s.d. September 2025.**
- Koordinator pelaksanaan Vaksinasi OPD setempat.
- Pendekatan vaksinasi "**Serentak Terpadu**" (**target desa harian**).
- Target Wilayah Lampung, Jawa, Bali, NTB, dan wilayah lain yang sedang mengalami peningkatan kasus PMK.







# LINIMASA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PMK



# KIE PENCEGAHAN PMK




0811-1182-7889

**Hotline Satuan Tugas Pelaporan Penyakit Hewan**

**ANTISIPASI PERUBAHAN CUACA EKSTREM**

**Format pelaporan WhatsApp**

Nama, Status Pengirim, Tgl Kejadian, Alamat,  
Jumlah Hewan Terdampak, Jenis Hewan, Tanda Klinis,  
Share Lokasi (Apabila memungkinkan)

**Info Penting!**

Tidak menerima panggilan  
(hanya menerima pesan melalui WhatsApp)

Pertanian Bekerja Sepuluh Hari  
ditjenpkh.pertanian.go.id



## USAHA KITA

Amankan TERNAK Dengan

## BIOSEKURITI



**PEMISAHAN**

- Memisahkan ternak yang sakit selama 14 hari
- Memisahkan ternak yang tidak sehat dengan ternak yang sehat

**PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI**

- Melakukan pembersihan kandang dan tanah pada kandang, penitikan, dan kandang secara rutin
- Disinfektan dilakukan setelah proses pembersihan
- Pastikan disinfektan diaplikasikan sesuai petunjuk sesuai petunjuk pemakaian

**PEMBATASAN PERGERAKAN**

- Membatasi akses orang, barang dan hewan lain untuk masuk ke peternakan
- Tidak saling meminjam antar peternak
- Menutup pagar atau pembatas di area peternakan

Jika menemukan ternak yang terdapat infeksi, segera laporkan ke Petugas Kesehatan Hewan atau Petugas Satgas

**Hotline 0811-1182-7889**

Satuan Tugas Pelaporan Penyakit Hewan: Nama, Status Pengirim, Tanggal Kejadian, Alamat, Jumlah Hewan Terdampak, Jenis Hewan, Tanda Klinis, Share Lokasi.



## SAAT BELI TERNAK



**PASTIKAN**

Hewan ternak sehat, telah divaksin PMK dan memiliki Sertifikat Veteriner (SV)

Ternak baru dipisahkan selama 14 hari

Jika menemukan ternak yang tidak sehat, segera laporkan ke Petugas Kesehatan Hewan atau hubungi hotline Satgas

**Hotline 0811-1182-7889**

**Satuan Tugas Pelaporan Penyakit Hewan**

Format Pelaporan WhatsApp: Nama, Status Pengirim, Tanggal Kejadian, Alamat, Jumlah Hewan Terdampak, Jenis Hewan, Tanda Klinis, Share Lokasi.



## PASTIKAN!

SAPI YANG SEHAT



**Wajib**

## DIVAKSIN PMK

rutin setiap 6 bulan sekali

Jika menemukan ternak yang kurang sehat, segera laporkan ke Petugas Kesehatan Hewan atau hubungi hotline Satgas

**Hotline 0811-1182-7889**

Satuan Tugas Pelaporan Penyakit Hewan: Nama, Status Pengirim, Tanggal Kejadian, Alamat, Jumlah Hewan Terdampak, Jenis Hewan, Tanda Klinis, Share Lokasi.

# PROGRAM PRIORITAS DITJEN PKH: AYAM PETELUR MENDUKUNG GERAKAN PANGAN MERAH PUTIH

# PENGEMBANGAN KLAS TER PETERNAKAN AYAM PETELUR

## PROGRAM PEKARANGAN PANGAN BERGIZI

### MENDUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

#### 01 | Sasaran Program

38 Provinsi, 148 Kab/Kota  
514 desa  
823 kelompok @600 ekor  
1 kelompok 15 rumah tangga  
1 rumah tangga 40 ekor

#### 02 | Populasi dan Produksi

493.500 ekor ayam  
Menghasilkan telur  
11,99 juta butir/bulan

##### Fasilitas :

- Bantuan ayam petelur umur 16 minggu
- Bantuan pakan
- Paket kandang beserta tempat pakan dan minum
- Obat/vitamin

#### 03 | Konsumsi Sasaran Rumah Tangga

1,48 juta  
butir/bulan  
50  
ribu orang

#### 04 | Penjualan

10,51  
Juta butir/bulan

BUMDES  
/  
BUMD

87,65% dari produksi telur  
ayam memenuhi 29,20%  
kebutuhan MBG per bulan

500 UNIT PELAYANAN  
PERLU 36 JUTA BUTIR  
PER BULAN



1,5 JUTA SISWA PENERIMA  
MANFAAT MBG

# KRITERIA DAN PENERIMA SASARAN PROGRAM



## KRITERIA LOKASI DESA SASARAN PROGRAM

### Kriteria Utama

1. Mempunyai infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak dan komponen lainnya;
2. Mempunyai potensi sumber daya pakan dan air;
3. Terintegrasi dalam kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B); dan
4. Lokasi berpotensi untuk pengembangan ayam petelur

### Kriteria pendukung

1. Memiliki akses dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum; dan
2. Memiliki akses dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

## PERSYARATAN SASARAN PROGRAM KELOMPOK TANI/TERNAK, GAPOKTAN, DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI LAINNYA

- a. Kelompok terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- b. Mengusulkan proposal kegiatan dan lulus penilaian e-proposal;
- c. Tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari sumber lain pada tahun yang sama;
- d. Mendapatkan surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota dan diusulkan di e-proposal; dan
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan





# POTENSI PRODUKSI TELUR DAN ANALISA USAHA SKALA 600 EKOR

No	Komponen	Volume	Satuan	Hasat	Total
<b>A.</b>	<b>POTENSI PRODUKSI AYAM PETELUR PER KELOMPOK 600 EKOR DALAM BUTIR</b>				
1	Produksi telur/bulan (rata-rata provitas 81%)	14.580	butir	1.500	21.870.000
2	Konsumsi anggota kelompok	1.800	butir	1.500	2.700.000
3	Kebutuhan unit pelayanan MBG/bulan (3000 porsi)	12.780	butir	1.500	19.170.000
<b>B.</b>	<b>ANALISA USAHA LAYER PER KELOMPOK POPULASI 600 EKOR (PEMBIAYAAN SELANJUTNYA SWADAYA)</b>				
1	Pakan swadaya selama 1 siklus produksi (18 bulan)	31.122	kg	7.500	233.415.000
2	Obat dan vitamin/siklus	7.800	unit	800	6.240.000
3	Penjualan telur ke BUMDES untuk memenuhi unit pelayanan MBG	230.040	butir	2.000	460.080.000
4	Profit margin/siklus (19-95 minggu)				220.425.000
<b>Profit margin/bulan per kelompok</b>					<b>12.245.833</b>
<b>Profit margin/bulan per anggota kelompok</b>					<b>816,389</b>

